

Edukasi dan Diskusi Sebagai Upaya Membangkitkan Peran Mahasiswa Dalam Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Pencegahan Korupsi di Indonesia

Erna Sunarti^{1*}, Riana Permatasari², Afina Murtiningrum³, Destary Praptawati⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Sastra Inggris, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

erna.sunarti@unissula.ac.id*

Article information	Abstrak
Article history:	
Received 17 Februari 2025	
Approved 23 Februari 2025	
	<p><i>Tingkat korupsi yang tinggi merupakan masalah yang dihadapi banyak negara termasuk Indonesia. Indeks korupsi di Indonesia yang masih tergolong tinggi memicu pemikiran tindakan pencegahan yang dapat dilaksanakan untuk menekan jumlah kasus korupsi yang ada. Salah satu strategi untuk menekan angka korupsi adalah menerapkan nilai-nilai Islam pada konsep kepemimpinan modern. Nilai-nilai Islam seperti adil, amanah, jujur dan bertanggung jawab dapat mencegah tindakan korupsi jika diimplementasikan dalam konsep kepemimpinan yang ada. Penanaman nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan dapat melalui pendidikan karakter dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan kepemimpinan yang transparan dan adil. Pengabdian masyarakat dilaksanakan di Gedung Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya, pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif yang dihadiri oleh 44 mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam. Hasil yang dicapai dari program pengabdian masyarakat ini adalah memberikan edukasi dan pelatihan kepada para mahasiswa mengenai nilai-nilai Islam yang dapat diimplementasikan pada konsep kepemimpinan modern dengan memperhatikan tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi pada ranah praktis.</i></p>
	<p>Kata Kunci : Korupsi; Krisis Kepercayaan Publik; Nilai-Nilai Islam; Kepemimpinan</p>

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan institusi lainnya. Menurut Transparency International (2023), Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Indonesia masih menunjukkan angka yang memprihatinkan, yang mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu diperkuat.

Di Indonesia, kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, aparat penegak hukum, dan sektor swasta terus menjadi perhatian utama. Laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sektor yang paling rentan terhadap korupsi mencakup pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pengelolaan sumber daya alam (KPK, 2023). Maraknya kasus suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan integritas di berbagai level pemerintahan. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi hukum, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap stabilitas sosial dan ekonomi negara.

Dalam Islam, korupsi dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip keadilan dan kejujuran, serta bertentangan dengan nilai-nilai akhlak dan moralitas yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Konsep amanah (kepercayaan), 'adalah (keadilan), dan ihsan (kebaikan) menjadi landasan utama dalam membangun integritas dan akuntabilitas di tengah masyarakat (Al-Mawardi, 2011). Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan pemerintahan dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam menangani korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik.

Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis agama dapat memberikan dampak yang signifikan dalam upaya pencegahan korupsi. Studi yang dilakukan oleh Sulaiman (2020) menekankan pentingnya pendidikan moral dan agama dalam membentuk karakter individu yang berintegritas. Sementara itu, penelitian oleh Rahman dan Hakim (2021) menemukan bahwa penerapan nilai-nilai Islam di sektor publik dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan masyarakat.

Mahasiswa sebagai *agent of social change* dan *agent of social control* memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menerapkan nilai-nilai Islam dalam menangani korupsi dan krisis kepercayaan publik. Sebagai *agent of social change*, mahasiswa dapat menjadi penggerak utama dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya integritas dan transparansi melalui berbagai kegiatan edukasi, advokasi, dan gerakan sosial. Sementara itu, sebagai *agent of social control*, mahasiswa berperan dalam mengawasi kebijakan pemerintah, mengkritisi praktik korupsi, serta memberikan solusi berbasis nilai-nilai Islam dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih (Yunus, 2018).

Dari uraian di atas, tujuan pengabdian ini adalah memberikan edukasi dan memahami sudut pandang mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Selain itu diharapkan pula dapat meningkatkan peran mahasiswa sebagai penggerak perubahan sosial dan pengawas kebijakan publik dalam mencegah dan memberantas korupsi.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan di Gedung Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dengan memberikan edukasi kepada Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam tentang kepemimpinan yang berintegritas dalam Islam untuk menangani korupsi dan krisis kepercayaan publik melalui pemahaman perspektif nilai-nilai Islam.

Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif dalam bentuk diskusi aktif, yang melibatkan komunitas masyarakat,

akademisi, serta tokoh agama untuk menciptakan diskusi yang konstruktif mengenai peran nilai-nilai Islam dalam pemberantasan korupsi.

Peserta pengabdian berjumlah 44 mahasiswa yang merupakan perwakilan dari provinsi atau kota di Indonesia yang mendaftar melalui panitia seleksi. Masing-masing perwakilan telah melalui proses *screening* hingga terpilih sebagai perwakilan daerahnya.

Pengabdian ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yakni:

1. Identifikasi dan Analisis Kebutuhan
 - a. Melakukan survei dan wawancara dengan mahasiswa mengenai pemahaman mereka terhadap korupsi dan dampaknya terhadap kepercayaan publik.
 - b. Mengidentifikasi nilai-nilai Islam yang relevan dalam menangani permasalahan tersebut.
2. Sosialisasi dan Pelatihan
 - a. Mengadakan diskusi dengan narasumber dari kalangan akademisi dan ulama untuk membahas konsep nilai-nilai Islam terkait dengan antikorupsi.
 - b. Menyelenggarakan lokakarya yang melibatkan mahasiswa dalam memahami dan menerapkan prinsip amanah, adil, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Monitoring dan Evaluasi
 - a. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas program melalui kuesioner dan wawancara pasca-kegiatan.
 - b. Mengukur dampak kegiatan terhadap perubahan sikap dan pemahaman masyarakat terhadap korupsi dan kepercayaan publik.
4. Penyusunan dan pelaporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pengabdian masyarakat ini dijabarkan beberapa materi yang terkait dengan peran nilai-nilai Islam dalam menangani korupsi dan krisis kepercayaan publik. Terdapat enam hal utama yang disampaikan mencakup konsep kepemimpinan berintegritas dalam Islam, nilai-nilai Islam dalam menangani korupsi, implementasi nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan modern, studi kasus terkini, dan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepemimpinan berintegritas.

Pertama peserta pelatihan diajak untuk memahami konsep kepemimpinan berintegritas dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam tentunya merujuk pada apa yang tertuang pada Al-Qur'an yaitu pemimpin yang adil dan amanah. Kepemimpinan dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan dan amanah (kepercayaan) dari masyarakat. Salah satu ayat yang menunjukkan bentuk kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adalah QS. Al-Ahzab (33:21) dimana Nabi Muhammad SAW disebut sebagai seorang uswatan hasanah yang dapat menegakkan hukum dengan adil dan tidak membedakan status sosial. Dengan demikian, nilai integritas dalam Islam berkaitan dengan konsep amanah dan tanggung jawab dalam kepemimpinan.

Kedua, peserta pelatihan diberikan pemahaman mengenai nilai-nilai Islam dalam menangani korupsi yang di dalamnya disampaikan larangan korupsi dalam Islam dan pentingnya nilai kejujuran dan transparansi. Dalam QS. Al-Baqarah (2:188) telah disampaikan larangan korupsi yaitu, "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan itu kepada hakim-hakim untuk memakan sebagian harta orang lain dengan cara yang salah." Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, juga disampaikan bahwa "Setiap pemimpin yang memimpin rakyatnya dan dia berkhianat, maka Allah akan menghalanginya surga baginya." Berdasarkan kutipan ayat Al-Quran dan hadis tersebut, kita dapat

menyimpulkan bahwa Islam melarang tindakan korupsi karena dapat merugikan orang lain dan bagi orang yang melakukan korupsi diancam tidak masuk surga. Dengan demikian, kejujuran merupakan nilai yang sangat diperlukan dalam memperbaiki sistem yang rusak dan menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.

Ketiga, peserta pelatihan diberikan pemaparan mengenai implementasi nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan modern. Ada dua konsep besar terkait implementasi nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan modern yaitu reformasi administrasi dan pengawasan serta peningkatan pendidikan karakter. Dalam bidang administrasi dan pengawasan diperlukan reformasi dimana sistem pengawasan harus berdasarkan kejujuran yang ada dalam sistem pemerintahan Islam pada masa khalifah. Terlebih juga perlu adanya pengoptimalan penggunaan teknologi dalam melakukan transparansi keuangan seperti penggunaan platform *e-budgeting* dan *e-procurement* untuk meminimalisir praktik korupsi. Peningkatan pendidikan karakter juga menjadi sebuah hal penting dalam implementasi nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan modern. Melalui pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam seperti akhlaq (etika) dan amanah, diharapkan generasi pemimpin yang lahir memiliki integritas yang kuat.

Keempat, peserta pelatihan diberikan studi kasus terkini terkait dengan kepemimpinan. Peserta menganalisis hambatan dan tantangan yang muncul dalam memberantas korupsi. Salah satu hambatan dan tantangan yang menjadi bahan diskusi adalah adanya politik uang dimana masih banyak pihak yang menggunakan politik uang dan praktik korupsi dalam pemilu dan jabatan publik. Tantangan lainnya adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, dibutuhkan adanya peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya pemilihan pemimpin yang berintegritas.

Kelima, berdasarkan tantangan yang muncul, maka diperlukan adanya strategi untuk meningkatkan kepemimpinan berintegritas yaitu pendidikan dan pembinaan karakter, menciptakan sistem yang adil dan transparan dan meningkatkan peran masyarakat dan media. Dengan menerapkan tiga hal tersebut maka diharapkan dapat terwujud kepemimpinan berintegritas yang jauh dari korupsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis masalah yang mendasari pengabdian masyarakat ini maka dapat disimpulkan bahwa terbentuknya kepemimpinan yang berintegritas merupakan hal yang sangat penting dalam mengatasi korupsi dan krisis kepercayaan publik. Penerapan nilai-nilai Islam dapat memperkuat terbentuknya kepemimpinan yang berintegritas. Dengan pengabdian masyarakat ini, diharapkan berbagai pihak dapat terlibat dalam menciptakan sistem yang lebih bersih, transparan dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Mawardi. (2011). *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* (Hukum-Hukum Pemerintahan dalam Islam). Pustaka Azzam.
- [2] Al-Qur'an dan Hadis.
- [3] Bukhari, Sahih. (1997). Hadis tentang Kepemimpinan dan Korupsi.
- [4] Indikator Politik Indonesia. (2023). Survei Kepercayaan Publik.
- [5] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Keuangan dan Pengelolaan Anggaran Negara.
- [6] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). Laporan Tahunan KPK 2023: Evaluasi dan Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jakarta: KPK.

- [7] Rahman, A., & Hakim, L. (2021). Islamic Values and Public Accountability: A Study in Governance Systems. *Journal of Islamic Ethics*, 5(2), 120-135.
- [8] Sulaiman, M. (2020). Pendidikan Moral dan Agama dalam Mencegah Korupsi: Pendekatan Islam. *Jurnal Etika Islam*, 8(1), 45-60.
- [9] Transparansi Internasional. (2023). Indeks Persepsi Korupsi 2023.
- [10] Yunus, M. (2018). Peran Mahasiswa dalam Perubahan Sosial dan Pengawasan Kebijakan Publik. *Jurnal Sosial & Humaniora*, 10(2), 75-90.